

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan memiliki peranan vital dalam perikehidupan manusia, baik dalam aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang, sehingga wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal. Hutan diyakini mampu menyediakan keuntungan secara lestari, dengan syarat dikelola dengan metode yang tepat. Paradigma pembangunan hutan berkembang dari *primitive timber management*, *timber management*, *forest resources management*, hingga *social forestry*. Perhutanan sosial atau *social forestry* bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, dan mencegah konflik tenurial (Situmorang, 2023). Pada implementasinya, terdapat lima skema pelaksanaan perhutanan sosial, yaitu hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.

Berdasarkan statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Di samping itu, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan rakyat merupakan contoh penerapan dari hutan hak jika ditinjau dari status kepemilikannya. Hutan rakyat merupakan satu kesatuan ekosistem hutan yang berada di lahan milik dan dikelola oleh masyarakat. Hutan rakyat memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat individual, tidak memiliki manajemen formal, cenderung subsisten, dan dikelola oleh keluarga. (Awang, 2007).

Kemampuan produksi hutan rakyat di Pulau Jawa jauh lebih tinggi mencapai 18.523.433 m³/tahun, dibandingkan hutan negara yang hanya 889.858m³/tahun. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan dan produktivitas hutan rakyat (6,54 m³/ha/tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan hutan negara (0,50 m³/ha/tahun), atau

kehilangan potensi produktivitas lahan berkisar 6,04 m³/ha/tahun. Dalam hal mitigasi perubahan iklim, hutan rakyat di Pulau Jawa memiliki estimasi potensi serapan karbon sebesar 50.724.689,17 ton atau 15,75 ton/ha (Ferdous dkk., 2014). Di Kabupaten Gunungkidul, kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani berkisar antara 13% hingga 40%. Petani di wilayah Pegunungan Seribu lebih mengandalkan hasil tanaman pertanian hasil agroforestri, yang menyumbang sekitar 59% dari total pendapatan (Oktalina dkk., 2015). Hal tersebut menunjukkan peran penting hutan rakyat baik bagi perekonomian masyarakat maupun kestabilan lingkungan sehingga perlu untuk menjamin keberlanjutannya.

Perkembangan hutan rakyat dimulai saat lahan masyarakat ditanami kombinasi tanaman hutan dan pertanian atau agroforestri dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari hasil kayunya (Muslich & Krisdanto, 2006 dalam Purbawiyatna dkk., 2011). Penerapan sistem agroforestri dalam pemanfaatan lahan hutan rakyat merupakan bentuk strategi diversifikasi yang dipilih oleh petani guna mengoptimalkan fungsi lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemilihan jenis dalam agroforestri memiliki peranan yang sangat penting agar mencapai potensi produktivitas maksimal, meningkatkan nilai ekonomi, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan (Mukti dkk., 2024).

Masyarakat Kalurahan Giritirto juga menerapkan konsep agroforestri yang mengkombinasikan tanaman kehutanan (jati, mahoni, akasia, dan sengon) dengan tanaman pertanian (empon-empon, ketela, jagung, dan padi). Tanaman pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan menjadi mata pencaharian utama, sementara tanaman kehutanan berfungsi sebagai penunjang ekonomi melalui kegiatan jual beli.

Kalurahan Giritirto terletak di kawasan karst Pegunungan Sewu yang secara geomorfologis memiliki karakteristik hidrologi khas. Curah hujan tahunan di wilayah ini bervariasi antara 1.500 mm hingga 2.986 mm, namun struktur batuan kapur yang bersifat porus menyebabkan perkolasi air berlangsung sangat intensif. Akibatnya, ketersediaan air permukaan di daerah karst ini relatif rendah, sehingga masyarakat kerap mengalami kekeringan dan kekurangan air, terutama pada musim kemarau (Sulastro, 2013). Kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap

kebakaran lahan di beberapa titik wilayah Kalurahan Giritirto. Di sisi lain, pada puncak musim penghujan, kawasan ini justru menghadapi risiko banjir. Fenomena kekeringan dan banjir yang terjadi secara bergantian tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian dan kehutanan, yang merupakan sumber utama penghidupan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunungkidul (2022) menyatakan beberapa bencana alam dari tahun 2017 – 2021 diantaranya 500 kejadian banjir, 80 kejadian kekeringan, dan 1 kebakaran hutan dan lahan. Kejadian banjir di Kapanewon Purwosari memiliki luas bahaya kategori sedang (10,77 ha) dan tinggi (404,39 ha). Sementara itu, luas bahaya dan risiko kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang sama termasuk dalam kategori sedang seluas 2.355,39 hektare. Selain itu, luas kelas bahaya kekeringan di Kapanewon Purwosari adalah 6.699,33 hektare dan tergolong dalam kategori sedang. Ketidakstabilan kondisi iklim dan lingkungan ini menegaskan pentingnya upaya pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara eksplisit mendukung rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) Panggang. Dukungan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010–2030, serta diperkuat oleh sejumlah peraturan daerah dan peraturan bupati yang terbit setelahnya. Rencana ini mencakup aktivitas penambangan batu gamping, fosfat, dan kalsedon yang diproyeksikan akan berlangsung hingga tahun 2030. Meskipun kebijakan ini menunjukkan orientasi pada pemanfaatan potensi sumber daya mineral, pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian tinggi, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak dilaksanakan sesuai regulasi dan tanpa mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan hutan dan ekosistem di sekitarnya (Parlan & Lobo, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan fungsi ekologis kawasan, guna menghindari kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang.

Pendekatan yang dianggap paling tepat dalam menjawab kompleksitas permasalahan pengelolaan hutan rakyat adalah Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/SFM*), yang mencakup aspek produksi, sosial, dan ekologi (Adiba dkk., 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah menetapkan standar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang berfokus pada ketiga aspek tersebut. Namun, mengingat standar tersebut telah dikembangkan cukup lama, diperlukan modifikasi agar tetap relevan terhadap kondisi lokal dan sistem silvikultur yang diterapkan (Tohirin, 2021). Dalam konteks ini, metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dinilai efektif untuk menyederhanakan dan menguraikan permasalahan kompleks secara sistematis (Wedayani & Widyasari, 2020). Oleh karena itu, analisis keberlanjutan menggunakan standar LEI yang telah dimodifikasi dan disertai pembobotan melalui AHP menjadi penting untuk mendukung pemanfaatan hutan rakyat yang lestari dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Pengelolaan hutan rakyat di Kalurahan Giritirto memiliki ancaman keberlanjutan yang perlu diantisipasi. Kalurahan Giritirto terletak pada kawasan *karst* Pegunungan Sewu sehingga rawan terjadi bencana kekeringan, kelangkaan air, dan kebakaran lahan. Sebaliknya, pada saat musim penghujan, banjir di sejumlah titik turut menurunkan produktivitas hasil tanaman pertanian dan kehutanan sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, rencana pembangunan Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) untuk batu gamping, fosfat, dan kalsedon berpotensi mengganggu kelestarian hutan rakyat, sehingga menjadikan urgensi penelitian ini untuk dilakukan. Maka dari itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen untuk penilaian dan analisis keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul.
2. Menjadi dasar pertimbangan untuk optimalisasi pengelolaan hutan rakyat di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul yang sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.

1.5. Kebaruan

Penelitian terkait analisis keberlanjutan program kehutanan telah banyak dilakukan dengan fokus lokasi kajian, kriteria dan indikator, serta metode yang beragam. Pada penelitian terdahulu, lokasi kajian bervariasi di antaranya taman nasional, hutan lindung, hingga hutan rakyat. Biasanya, penelitian terkait hal ini dilaksanakan pada tingkat desa atau wilayah yang lebih luas. Penelitian ini memfokuskan lokasi kajian pada Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul sebagai objek studi. Lokasi tersebut belum pernah diteliti dalam konteks evaluasi keberlanjutan hutan rakyat, sehingga memberikan nilai kebaruan dalam penelitian ini.

Selain fokus lokasi kajian, penggunaan kriteria dan indikator juga menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, banyak dikembangkan kriteria dan indikator sesuai dengan melakukan FGD oleh para ahli dan melibatkan masyarakat setempat (Karlina dkk., 2016). Sementara itu, penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator yang termuat dalam Standar Penilaian Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dikeluarkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dengan tiga aspek yaitu

ekologi, produksi, dan sosial. Selain itu, standar LEI yang digunakan juga hasil modifikasi agar lebih sesuai dengan hutan rakyat di Gunungkidul (Tohirin, 2021).

Metode penelitian terkait analisis keberlanjutan program kehutanan juga bervariasi. Salah satu penelitian terkait analisis keberlanjutan pengelolaan di kawasan hutan lindung mangrove dengan menggunakan metode *multidimensional scaling* (MDS). Selain itu, juga dikembangkan analisis keberlanjutan program kehutanan dengan metode interval. Kebaharuan lainnya dari penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penggunaan bobot tertentu dalam setiap aspek, kriteria, dan indikator yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan melakukan analisis terhadap hasil kuesioner yang diberikan kepada para pakar. Dengan demikian, unsur kebaharuan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari lokasi penelitian; penggunaan kriteria dan indikator dengan standar LEI yang termodifikasi; serta penggunaan metode pembobotan dalam analisis datanya. Berbagai penelitian terdahulu yang relevan tertera pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan			
Tahun	Penulis	Judul	Rangkuman Penelitian
2024	Fredi Saipul Yusuf	Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bengkulu Selatan	Penelitian ini mengkaji lebih spesifik terkait status keberlanjutan di hutan tanaman rakyat dengan metode <i>Multidimensional Scaling (MDS)</i> .
2024	Daris Fahmaa Sutata, M. Iqbal Nur Madjid, Eva Luthfiana, Darmawati Ridho, Nevlya, M. Safitri, & Ronggo Sadono	Evaluating The Sustainability Status of Pinus Sari Forest as an Ecotourism Destination Using Multi-Dimensional Scaling	Penelitian ini mengkaji lebih spesifik terkait status keberlanjutan hutan pinus yang terletak di hutan lindung dengan metode <i>Multidimensional Scaling (MDS)</i> .

Tabel 1.1. Lanjutan

Penelitian Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan			
Tahun	Penulis	Judul	Rangkuman Penelitian
2021	Tohirin	Silvikultur Tradisional dan Kelestarian Wono di Kabupaten Gunungkidul	Penelitian ini mengkaji lebih spesifik pada kelestarian praktik silvikultur tradisional (<i>Wono</i>) yang dikembangkan di Provinsi Gunungkidul menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>
2019	Hermudananto & Nunuk Supriyanto	Evaluasi Produktivitas Kayu dan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Skema Forest Stewardship Council di Jawa Timur	Penelitian ini mengkaji lebih spesifik pada kelestarian hutan rakyat dengan skema FSC, khususnya pada aspek keberlanjutan produksi. Pada jurnal ini, dibahas lebih spesifik terkait evaluasi dan usaha untuk memenuhi produktivitas kayu di lokasi tersebut menurut Skema FSC
2016	Endang Karlina, Cecep Kusuma, Marimin, & M. Bismark	Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini berfokus pada analisis status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung pada aspek ekologi, ekonomi, dan sosial menggunakan metode <i>Multidimensional Scaling (MDS)</i>
2011	Alan Purbawiyatna, Hariadi Kartodihardjo, Hadi S. Alikodra, & Lilik Budi Prasetyo	Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Rakyat di Kawasan Berfungsi Lindung	Penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait analisis keberlanjutan di hutan rakyat berfungsi lindung di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan standar penilaian oleh LEI (2002) tanpa pembobotan